

TESIS

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS TIDAK
TERPENUHINYA HAK LAYANAN KESEHATAN DI MASA
PANDEMI**



OLEH:

ZILDA KHILMATUS SHOKHIKHAH, S.H

NIM: 032014153026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS TIDAK
TERPENUHINYA HAK LAYANAN KESEHATAN DI
MASA PANDEMI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

ZILDA KHILMATUS SHOKHIKHAH, S.H

NIM: 032014153026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
tanggal 26 Januari 2022**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Sukardi, S.H., M.H
NIP: 196106271989031002

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H.M.Hum
NIP: 196401071989032001

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H.M.Hum
NIP: 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 26 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Rosa Ristawati S.H.,LL.M.

Anggota : 1. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H. M.Hum

2. Dr. Sukardi, S.H.,M.H

3. Dr. Astutik, S.H.,MH

4. Dwi Rahayu Kristianti, S.H.,M.A

ABSTRAK

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab negara. Jaminan hak atas kesehatan telah tertuang dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Di masa pandemi covid 19, kesehatan menjadi salah satu aspek penting bahkan menjadi prioritas kondisi darurat. Tingginya kasus Covid 19 menyebabkan beberapa layanan kesehatan kewalahan dalam menangani pasien, bahkan di beberapa kondisi harus menolak pasien yang berobat. Kondisi ini diperparah dengan karakter virus yang mudah menyebar dan belum ditemukan vaksin atau obatnya secara pasti disebabkan virus ini merupakan virus yang baru. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia untuk bisa melakukan upaya pemenuhan hak dengan maksimal dan melewati masa kedaruratan ini dengan memperhatikan koridor hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merupakan tanggung jawab negara dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak atas layanan kesehatan, sekalipun dalam kondisi darurat negara. Sehingga jika dalam kasus terjadi kematian akibat tidak mendapat layanan kesehatan, maka negara gagal melaksanakan kewajibannya dan harus melakukan upaya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Negara perlu merumuskan bentuk pertanggung jawaban kepada warga negara yang menjadi korban akibat tidak mendapat layanan kesehatan.

Kata Kunci: Hak Kesehatan, Pandemi, Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

The Efforts to fully fulfill the right to health are the responsibility of the state. The guarantee of the right to health has been contained in both national and international legal instruments. During the COVID-19 pandemic, health is one of the most important aspects of an emergency situation. The high number of Covid-19 cases has caused some health services to be overwhelmed in handling patients, even in some conditions they have to refuse patients for treatment. This condition is exacerbated by the character of the virus that spreads easily and no vaccine or cure has been found for sure because this virus is a new virus. This condition is a challenge for the Indonesian state to be able to make maximum efforts to fulfill rights and pass this emergency period by paying attention to the corridors of human rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that it is the responsibility of the state to fulfill human rights, including the right to health services, even in a state of emergency. So if in the case of death due to not receiving health services, the state fails to carry out its obligations and must make efforts as a form of accountability. The state needs to formulate a form of accountability to citizens who are victims of not receiving health services.

Keywords: Health Rights, Pandemic, State Responsibilities

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga, Ayah Ahmad Afandi dan Ibu Munaworoh, serta kedua adik penulis Muhammad Iqbal Ramadhani dan Muhammad Abidzar Ibnu Affan yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H.,LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Aktieva Trijitrawati, S.H. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Kedua Tesis yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Sukardi,S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Magister Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

6. Mas Alief Putra Nugraha, yang juga masih menepuh pendidikan program Magister Kenotariatan terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini juga kepada kedua orang tua yang selalu support.
7. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung Arlanda, Didin, Imron, Lala, dan teman-teman kantor di Permata Bank yang turut membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum dan hak asasi manusia.

Surabaya, 26 Januari 2022

Penulis,

Zilda Khilmatus Shokhikhah, S.H

NIM. 032014153026

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Peraturan Perundang-undangan.....	ix
Bab I Pendahuluan	
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
4. Tinjauan Pustaka	9
5. Metode penelitian	12
5.1 Tipe Penelitian.....	12
5.2 Pendekatan Penelitian	12
5.3 Sumber Bahan Hukum	14
5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5.5 Analisis Bahan Hukum	15
6. Sistematika Penulisan	16
BAB II	
Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Di Masa Pandemi	
2.1. Hak Atas Layanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia	17
2.2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Layanan Kesehatan di Indonesia	26
2.3. Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Di Masa Pandemi	28
BAB III	
Tanggungjawab Pemerintah Atas Korban Di Masa Pandemi Akibat Tidak Mendapat Layanan Kesehatan	
3.1. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan.....	36
3.2. Tidak Terpenuhinya Kewajiban oleh Negara Terhadap Hak Atas Kesehatan dan Tanggung Jawab Negara Atas Korban Di Masa Pandemi Akibat Tidak Mendapat Layanan Kesehatan	45
BAB IV	
Penutup	
4.1 Kesimpulan	57
4.2. Saran.....	58
Daftar Bacaan.....	61

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. *International Sanitary Regulations* oleh *World Health Organization*
7. *International Health Regulations* oleh *World Health Organization*
8. *International Covenant on Elimination of All Forms of Racial Discrimination*
9. *International Covenant on Elimination of All Forms of Racial Discrimination Against Women*
10. *Covention on the Right of the Child*